

PERAN STRATEGIS INDONESIA MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Sita Hidriyah

Abstrak

Dalam Sidang Majelis Umum PBB 8 Juni 2018, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB tidak lepas dari upaya lobi yang dilakukan Indonesia, terutama untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Aktivitas lobi juga dilakukan oleh DPR untuk mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Peran strategis sudah tentu perlu dimainkan Indonesia ketika menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun nanti (2019-2020). Peran strategis tersebut perlu diarahkan pada upaya untuk mencari solusi damai terhadap berbagai persoalan keamanan internasional, selain tentunya juga perlu terus mendorong proses reformasi DK PBB. DPR harus mengawal dan memastikan bahwa peran Indonesia tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pendahuluan

Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB bersama lima negara lainnya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018. Kelima negara terpilih tersebut adalah Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Mereka akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, yakni dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Setiap tahun, Majelis Umum PBB memilih lima

negara melalui pemungutan suara tertutup. Untuk terpilih, kandidat harus mendapatkan suara 2/3 anggota PBB. Indonesia, yang bersaing dengan Maladewa untuk menjadi wakil kawasan Asia Pasifik, memperoleh suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suaranya.

Terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB (setelah pernah menjabat pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008) merupakan kepercayaan masyarakat internasional, dan



menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, hal tersebut dicapai karena adanya kerja keras seluruh komponen bangsa, khususnya para Diplomat Indonesia yang secara intensif melakukan lobi di berbagai forum internasional. Tulisan ini ingin menganalisis peran strategis Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tersebut.

Lobi Indonesia dan Peran DK PBB

Keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB tidak lepas dari upaya lobi yang dilakukan, terutama untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Berdasarkan lobi yang dilakukan, setidaknya ada tiga jenis dukungan yang didapatkan Indonesia untuk pencalonan.

Pertama, dukungan yang bersifat unilateral, di mana suatu negara langsung mendukung Indonesia tanpa ada syarat timbal balik. *Kedua*, dukungan yang bersifat timbal balik, yakni Indonesia akan mendukung suatu negara untuk mendapatkan posisi yang diinginkan di suatu badan internasional. Sebaliknya negara tersebut akan mendukung Indonesia untuk pencalonan anggota tidak tetap DK PBB. *Ketiga*, dukungan secara lisan yang telah disampaikan oleh pemerintah beberapa negara, baik dalam pertemuan bilateral maupun pada forum regional dan multilateral. Selain itu, Indonesia juga meminta negara-negara yang telah mendukung secara lisan untuk membuat dukungan secara tertulis, yang jumlahnya ternyata semakin bertambah.

Menurut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), terpilihnya Indonesia

merupakan hasil kerja keras jangka panjang diplomat Indonesia. Isu pencalonan Indonesia selalu diangkat dalam setiap pertemuan Kepala Negara dengan negara sahabat. Presiden Jokowi juga menegaskan, Indonesia melakukan kampanye bersih dalam pencalonan itu. Indonesia lebih mengedepankan rekam jejak dan visi Indonesia untuk DK PBB, yaitu dengan mencanangkan tema, "mitra sejati untuk perdamaian dunia" (*a true partner for world peace*).

Kondisi Indonesia yang stabil dan damai juga berkontribusi besar atas keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, selain kehidupan demokrasi di Indonesia yang dinilai semakin matang dan mendapat apresiasi internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa dari berbagai pertemuan di PBB terlihat jelas bahwa masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dengan melihat demokrasi dan toleransi sebagai aset untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK PBB. Yang tidak kalah penting, Indonesia selama ini juga dinilai selalu mengambil peran dan berkontribusi menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut menjadi pendukung pertimbangan utama negara-negara anggota PBB.

Aktivitas lobi juga dilakukan oleh DPR untuk mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Dalam berbagai kesempatan, baik secara bilateral ketika menerima kunjungan delegasi negara sahabat yang berkunjung ke DPR maupun melalui forum-forum sidang antar-parlemen, di mana DPR menyampaikan kepada mitra yang ditemuinya untuk mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak

tetap DK PBB. Lobi DPR tersebut dilakukan antara lain di sela-sela sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss, Maret 2018, yang dihadiri delegasi dari 146 negara, dan ketika menerima kunjungan Duta Besar negara sahabat yang berkunjung ke DPR.

Upaya lobi yang dilakukan Indonesia tersebut sesungguhnya ditujukan pada misi Indonesia untuk bisa lebih berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Menjaga perdamaian dunia adalah kewajiban sebagai amanat kemerdekaan negara Indonesia. Sebagai anggota PBB, kewajiban tersebut sesuai dengan salah satu tujuan utama dibentuknya PBB. Tujuan utama dibentuknya PBB berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB adalah untuk memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional, terutama melalui peran dan fungsi yang dijalankan oleh anggota DK PBB.

DK PBB bertanggung jawab akan terselenggaranya perdamaian dan keamanan internasional. Anggota badan ini terdiri dari 5 anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan China) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum setiap 2 tahun. Tugas dari DK PBB antara lain menyelesaikan persengketaan dengan damai, mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan, serta mengawasi wilayah yang sedang bersengketa. Terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB menjadi momentum bagi Indonesia untuk bisa berkontribusi dan mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian dunia.

Menjembatani Perdamaian dan Mendorong Reformasi DK PBB

Meski Indonesia menjadi anggota tidak tetap dalam DK PBB dan hanya bertugas selama dua tahun, namun peran strategis tetap dapat dilakukan. Secara normatif saja, keberadaan Indonesia di DK dapat ikut mempengaruhi keputusan PBB, meskipun tidak memiliki keistimewaan hak veto sebagaimana 5 negara anggota tetap DK PBB. Indonesia dapat turut memberikan pandangan dan ide untuk menjaga keamanan serta stabilitas global. Karena bagaimanapun, ketika PBB membahas persoalan keamanan internasional, maka suara anggota DK PBB secara keseluruhan (baik tetap maupun tidak tetap) harus didengar dan menjadi bahan pertimbangan. Artinya, suara Indonesia juga harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan PBB dalam memutuskan persoalan keamanan internasional.

Lebih dari itu, Indonesia dapat memainkan peran sebagai “pembangun jembatan” (*bridge-builder*) perdamaian, terutama dalam mencari solusi damai atas berbagai persoalan keamanan internasional yang hingga kini belum terselesaikan. Misalnya dalam menyikapi persoalan keamanan di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel, Indonesia dapat memainkan peran untuk mengingatkan kembali negara-negara besar yang menjadi anggota tetap DK PBB, khususnya AS, untuk kembali mendorong proses perdamaian di Timur Tengah. Proses perdamaian tersebut harus bisa mengakomodasi pandangan para pihak yang berkonflik dan mengedepankan keadilan, khususnya bagi bangsa Palestina.

Melalui DK PBB, Indonesia juga dapat terus mengawal persoalan keamanan regional yang berpotensi memunculkan konflik, seperti keamanan di perairan Laut China Selatan yang dipersengketakan oleh China dan beberapa negara ASEAN. Dalam isu tersebut, Indonesia harus mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk mengedepankan perundingan damai dalam proses penyelesaiannya dan menghormati hukum internasional. Terhadap persoalan keamanan di Semenanjung Korea yang sudah semakin kondusif, melalui keanggotaannya di DK PBB, Indonesia harus turut memastikan bahwa perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan yang nantinya akan dicapai dapat diimplementasikan dengan baik.

Sebagaimana ditekankan Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia harus memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia harus mendorong budaya *habit of dialogue*, agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai. Untuk mendukung hal itu, Indonesia harus berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Sementara itu, untuk menyikapi ancaman terorisme dan ekstremisme, yang menjadi tantangan bersama masyarakat internasional, Indonesia harus memanfaatkan keanggotaan di DK PBB untuk membentuk *global comprehensive approach* untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Tiga peran tersebut merupakan peran strategis yang dapat dilakukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Indonesia harus memanfaatkan secara maksimal peranan PBB untuk kepentingan perdamaian

di dunia, yaitu dengan terus mendorong pentingnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB (*peacekeepers*), terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terbebas dari konflik. Sejauh ini Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang berkontribusi besar dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, terdapat ribuan pasukan penjaga perdamaian PBB tengah bertugas di 10 misi perdamaian PBB di dunia, terutama di Asia dan Afrika.

Peran strategis lainnya, adalah mendorong proses reformasi di dalam tubuh PBB. Sejak *World Summit PBB* tahun 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan DK lebih demokratis dan representatif. Setidaknya ada 5 isu kunci yang perlu dibahas, yakni yang mencakup: 1) Kategori keanggotaan (*Categories of membership*); 2) Soal veto (*Question of veto*); 3) Keterwakilan kawasan (*Regional representation*); 4) Perluasan keanggotaan DK dan mekanisme kerjanya (*Size of the enlarged Security Council and its working methods*); 5) Hubungan DK dan Majelis Umum PBB (*The relationship between the Security Council and the General Assembly*).

Indonesia harus mendorong kembali proses reformasi DK PBB, karena hingga kini belum terdapat kemajuan berarti, khususnya akibat perbedaan posisi yang cukup tajam antara berbagai kelompok negara terkait kelima isu kunci reformasi DK PBB. Indonesia harus mengupayakan agar pembahasan reformasi DK PBB dilakukan secara komprehensif. Untuk kategori keanggotaan, misalnya, Indonesia perlu mendorong agar keanggotaan DK PBB memperhatikan

keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang serta major *world constituencies* dalam proposal peningkatan keanggotaan DK PBB.

Terkait hak veto, perlu dipikir ulang penggunaannya, karena tidak mencerminkan realitas sistem internasional masa kini yang telah mengalami perubahan mendasar baik keterwakilan maupun substansi. Menyangkut keterwakilan kawasan, perlu dicari keseimbangan terhadap realitas geopolitik dan keterwakilan kawasan, dengan mempertimbangkan: ketidakseimbangan keterwakilan yang sangat besar untuk kawasan Asia dan Afrika; meningkatkan keterwakilan negara berkembang; dan perlunya keterwakilan yang lebih berimbang sebagai cermin keberagaman dan pluralitas dari dunia dewasa ini. Sementara untuk meningkatkan mutu keputusan DK dan meningkatkan rasa kepemilikan bersama, Indonesia perlu mendukung interaksi yang lebih besar antara DK dengan para anggota PBB, organ utama PBB, organisasi regional serta pemangku kepentingan lainnya.

Peran strategis Indonesia tidak semata-mata karena Indonesia menjadi kontributor besar dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB, tetapi juga karena tanggung jawab sebagai anggota PBB yang sudah seharusnya peduli pada perdamaian dunia. Indonesia harus menjadi jembatan penghubung bagi upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penutup

Peran strategis perlu dimainkan Indonesia ketika pada awal Januari 2019 hingga akhir 2020 menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Peran strategis tersebut perlu diarahkan pada upaya mencari solusi damai terhadap potensi konflik ataupun konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Indonesia harus memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, serta mendorong budaya *habit of dialogue*, agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai. Indonesia juga harus berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Reformasi DK PBB juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan peran strategis yang dilakukan Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, DPR perlu mengawal dan memastikan bahwa Indonesia dapat secara sungguh-sungguh memainkan peran strategisnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Referensi

- "Delegasi DPR Lobi Negara IPU Dukung Indonesia Masuk DK PBB", <http://www.beritasatu.com/dunia/484942-delegasi-dpr-lobi-negara-ipu-dukung-indonesia-masuk-dk-pbb.html>, diakses 2 Juli 2018.
- "Gempur Narkoba, Perang Simetris Menaklukkan Indonesia", *Republika*, 21 Februari 2018, hal. 10.
- "Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Diharapkan Makin Aktif Tuntaskan Masalah Palestina", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/10/07110901/jadi-anggota-dk-pbb-indonesia-diharapkan-makin-aktif-tuntaskan-masalah>, diakses 26 Juni 2018.

"Jadi Anggota Tidak tetap DK PBB Buah Kerja Keras Diplomat Indonesia", <http://mediaindonesia.com/read/detail/166011-jadi-anggota-tidak-tetap-dk-pbb-buah-kerja-keras-diplomat-indonesia>, diakses 27 Juni 2018.

"Jadi DK PBB, Momentum Indonesia Jaga Perdamaian Dunia", <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/06/09/pa1bbj428-jadi-dk-pbb-momentum-indonesia-jaga-perdamaian-dunia>, diakses 25 Juni 2018.

"Mau Apa Indonesia di Dewan Keamanan PBB?", <https://kompas.id/baca/opini/2018/06/21/mau-apa-indonesia-di-dewan-keamanan-pbb/>, diakses 2 Juli 2018.

"Menlu Bersyukur Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/09/14212081/menlu-bersyukur-indonesia-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb>, diakses 26 Juni.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.